

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arliman, l. (2015). *penegakan hukum dan kesadaran masyarakat* (1st ed., vol. 1). deepublish.
- Darmawan, r., & Ardi, a. (2025). analisis penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif (studi kasus: kejaksaan negeri jakarta barat). *ilmu hukum*, 1–135.
- Diandra.(2009). viktimologi pandangan advokatterhadap perbuatan pidana dan korban (diandra, ed.; 1st ed., vol. 1). edugorilla community.
- Dimiyati, a. r. (2021). penyitaan aset tindak pidana korupsi dalam perspektif pengembalian keuangan negara ditinjau dari teori keadilan dan teori kemanfaatan. *jurnal hulum media justitia nusantara*, 11(vol. 11 no. 1 (2021): february 2021), 40–57.
- Dr. Ramadhan, m. (2021). *metode penelitian* (a. effendy, ed.; 1st ed., vol. 1). cipta media nusantara (cmn).
- Hasibuan, e. (2021). *hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum* (y. hayati, ed.; 1st ed., vol. 1). pt rajagrafindo persada.
- Hatta, m. (2022). *penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di indonesia* (l. novita, ed.; 1st ed., vol. 1). kencana.
- Jainah, z. (2017). budaya hukum penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba (j. ompu, ed.; 1st ed., vol. 1). pt rajagrafindo persada.
- Muis, a., Anwar, h., & Rosidawati, i. (2021). *hukum kepolisian dan kriminalistik* (a. budiman, ed.; 1st ed., vol. 1). pustaka reka cipta.
- Prima, r. (2025). aspek hukum tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba (1st ed., vol. 1). literasi nusantara.
- Sadi, m. (2017). *pengantar ilmu hukum* (winarno, ed.; 1st ed., vol. 2). pt kharisma putra utama.
- Sinaga, e., & Sabila, s. (2020). *narkoba anak pidana dan pemidanaan* (y. hayati, ed.; 1st ed., vol. 2). pt rajagrafindo persada.
- Santoso, t. (2023). *asas-asas hukum pidana* (y. hayati, ed.; 1st ed., vol. 1). pt rajagrafindo persada.
- Sriwidodo, j. (2023). *pengantar hukum acara pidana*.

Tarigan, i. (2017a). narkotika dan penanggulangannya (n. subekti, ed.; 1st ed., vol. 1). deepublish.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Publikasi Ilmiah

Adnyani, n. k. s. (2021a). kewenangan diskresi kepolisian republik indonesia dalam penegakan hukum pidana. *jurnal ilmiah ilmu sosial*, 7(2), 135.

Afifah, f., & Warjiyati, s. (2024). tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *jurnal ilmu hukum wijaya putra*, 2(3031–4399), 142–152.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. (2024, december 25). *bnnp jawa barat ungkap kasus peredaran gelap narkotika sepanjang tahun 2024*. jabar.bnn.go.id.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023, november 1). *kasus narkotika raffi ahmad kembali diperkarakan*. bnn.go.id.

Butarbutar, a., & Butarbutar, e. (2024). penegakan hukum yang berwawasan kebangsaan, dalam negara hukum republik indonesia. *jurnal hukum justice*, 2(3024–9996), 28–36.

Dm, mohd. y. (2024). analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di indonesia. *milthree law journal*, 1(2), 149–180.

Donna Karina, g. (2024). analisis pendekatan teori keadilan john rawls dan teori utilitarianisme jeremy bentham terhadap konsep pemenuhan hak korban menurut prespektif viktimologi. *journal of indonesian comparative of syari'ah law*, 6(2), 259–276.

- Firmansyah, a., Widodo, h., & Mamang, d. (2022). tinjauan hukum implementasi diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba. *veritas*, 8(2), 127–142.
- Goa, m. (2025). penyalahgunaan kewenangan oleh oknum polisi dalam kasus narkoba. *media hukum indonesia (mhi)*, 2(3032–6591), 294–301.
- Hadi, s. (2018). principles of defense (rechtmatigheid) in decision standing of state administration. *jurnal cita hukum*, 5(2).
- Hr, m. a. (2021). lemahnya penegakan hukum di indonesia. *jish: jurnal ilmu syariah dan hukum*, 3(1), 57–68.
- Ikhsan, f., & Sulastri, d. (2025). kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb) sebagai tolak ukur normatif atas keputusan pengadilan tata usaha negara dalam mewujudkan reformasi yudisial. *qanuniya : jurnal ilmu hukum*, 2(2), 1–16.
- Intan Dian Vitaloka, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2023). pertanggungjawaban kepolisian sebagai penyidik dalam tindak pidana narkoba. *jurnal konstruksi hukum*, 4(3), 348–353.
- Iqsandri, r. (2022). pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di indonesia . *hukum dan kriminal*, 2(1), 1–3.
- Irawan, d., Retno Susmiyati, h., & Gusta Andini, o. (2023). pertanggungjawaban hukum penyidik terhadap perbuatan salah tangkap dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. *risalah hukum*, 19(1), 1–10.
- Jufri Dewa, m., La Senu, Haris, o., Tatawu, g., Sinapoy, m., & Sunoto, f. g. (2023). penyalahgunaan wewenang pejabat kepolisian dalam penerimaan anggota polri. *halu oleo legal research*, 5(1), 143–156.
- Karunia, a. (2022). penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. friedman. *hukum dan pembangunan ekonomi*, 10(1), 116–128.
- Kurniawan, a. (2018). pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. *masalah-masalah hukum*, 47(2527–4716), 111–117.
- Larumpa, r. (2023). *melihat hukum dalam kenyataan (suatu analisis teori-teori hukum)*. guemedia.
- Lukman, g., alifah, a., divarianti, a., & humaedi, s. (2021). kasus narkoba di indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (jppm)*, 2(3), 405–417.

- Michigan. (2009). masalah narkoba, psikotropika, dan obat2 berbahaya (1st ed., vol. 1). yayasan mitra bisnis.
- Mulyadi, g. (2023). *rekonstruksi regulasi kewenangan kepolisian negara republik indonesia dan badan narkoba nasional dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang berbasis keadilan* [phd dissertation]. universitas islam sultan agung (unissula).
- Nasser, a. a., Arifudin, o., Barlian, u. c., & Sauri, s. (2021). sistem penerimaan siswa baru berbasis web dalam meningkatkan mutu siswa di era pandemi. *biomatika : jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 7(1), 100–109.
- Nasywa Hafizah, Tiara Cantika Pebytabella p, Mutiya Sari, Rahmita Winanda, Rully Hidayatullah, & Harmonedi, h. (2025). identifikasi variabel penelitian, jenis sumber data dalam penelitian pendidikan. *jurnal qosim jurnal pendidikan sosial & humaniora*, 3(2), 586–596.
- Pratama, f., Pebriansya, r., & Pratama. M Alvi. (2024). konsep keadilan dalam pemikiran aristotele. *forikami*, 1(1111–1111), 1–25.
- Pratiwi, e., Negoro, t., & Haykal, h. (2022). teori utilitarianisme jeremy bentham: tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *jurnal konstitusi*, 19(2), 268.
- Purba, a., Renggong, r., & Madiong, b. (2025). implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba. *indonesian journal of legality of law*, 7(2), 160–165.
- Raja Gukguk, r. g., & Jaya, n. s. p. (2019). tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime. *jurnal pembangunan hukum indonesia*, 1(3), 337–351.
- Reynold Simanjuntak, & Apriska Sibarani. (2024). analisis dan implikasi terhadap penegakan hukum di indonesia. *amandemen: jurnal ilmu pertahanan, politik dan hukum indonesia*, 2(1), 134–140.
- Sativa, t. i. (2024). analisis kewenangan penyidik berdasarkan pasal 7 kuhap terhadap prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum di indonesia. *jurnal hukum dan kewarganegaraan*.
- Sembiring, r. (2018). keadilan pancasila dalam perspektif teori keadilan aristoteles. *aktual justice*, 3(2), 139–155.
- Setiadi, w. (2018). penegakan hukum: kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (law enforcement: its contribution to legal education in the context of human resource development). *ilmu hukum*, 2, 1–22.

- Shandy, a. (2019). kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di indonesia. *hukum*, 1(3), 306–313.
- Simatupang, m. a., Harun, h., & Abidin, z. (2025). peran kepolisian terhadap penanganan tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian negara republik indonesia. *jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum universitas malikussaleh*, 8(1).
- Sinaga, e., & Sabila, s. (2020). *narkoba anak pidana dan pemedanaan* (y. hayati, ed.; 1st ed., vol. 2). pt rajagrafindo persada.
- Sirojul Baehaqi, e. (2022a). keturutsertaan dalam tindak pidana. *an-nahdliyyah: jurnal studi keislaman*, 1(1).
- Soejono, s. (2026). masalah penegakan hukum dan kesadaran hukum. *hukum dan pembangunan*, 9(5), 1–16.
- Susiani, d. (2024). *pengantar hukum administrasi negara* (t. media, ed.; 1st ed., vol. 1). tahta media.
- Tallaut, l. j., & Adhari, a. (2022). kepastian hukum penerapan kriteria kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi republik indonesia. *jurnal analisis hukum*, 5(1), 26–39.
- Taufik, m. (2019). filsafat john rawls tentang teori keadilan . *studi islam*, 19(1), 41–63.
- tim pengembang pedoman bahasa indonesia. (2026, january 26). *kbbi daring*. kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- Winjaya, a. (2021). jurnal akta. *hukum*, 13(2), 1–18.
- Wiraguna, s. a. (2024). metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: studi eksploratif di indonesia. *public sphere: jurnal sosial politik, pemerintahan dan hukum*, 3(3).
- Yusuf dm, Mohd., Saragih, g. m., Setiawan, f., Sitompul, h. i., & Berson, h. (2025). analisis faktor penghambat penegakan hukum pidana di indonesia dalam perspektif teori lawrence friedman. *jurnal ilmiah advokasi*, 13(2), 711–725.
- Zairudin, a., Rato, d., & Dwi Anggono, b. (2023). konsep aliran filsafat hukum utilitarianisme dan relevansinya terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu. *jurnal rechtens*, 12(2), 273–286.